

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV terkait penelitian pemikiran politik Muhammadiyah mengenai Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Historitas lahirnya darul ahdi wa syahadah didorong oleh adanya permasalahan yang dialami bangsa Indonesia dimana selama ini masih terdapat paradoks pengamalan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, seperti kecenderungan akomodasi nilai-nilai lain dalam praksis sosial, ekonomi, dan politik. Disamping itu juga terjadi anomali dalam aktualisasi Pancasila oleh negara dan pelaku non-negara, dan seringnya terjadi konfrontasi Pancasila dengan agama, baik oleh umat beragama maupun negara itu sendiri. Darul ahdi wa syahadah tidak lahir tanpa sebab tetapi telah melalui proses pemikiran yang panjang dan pertimbangan yang matang, didasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan organisasi Muhammadiyah. Dengan kelahiran konsep Darul Ahdi wa Syahadah, Muhammadiyah semakin menegaskan komitmennya terhadap Pancasila. Hal ini bisa diibaratkan seperti Muhammadiyah ini menutup botol Pancasila yang sudah lama isi oleh Muhammadiyah. Tutup ini bernama darul ahdi wa syahadah. Dengan Darul Ahdi wa Syahadah, Muhammadiyah mengajak kepada warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya sebagai kekuatan mayoritas diharapkan mampu mengisi dan membangun Negara Pancasila yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Berbhineka Tunggal Ika sebagai negeri dan bangsa

yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejalan dengan cita-cita Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur

2. Rasionalitas konsep negara Darul Ahdi wa Syahadah dapat dilihat dari keselarasan antara konsep Negara Darul Ahdi wa Syahadah dengan dasar kajian lainnya yang relevan dan juga keselarasan dengan pemikiran Muhammadiyah sebelumnya mengenai konsep negara. Jika dilihat keselarasannya dengan kajian relevan mengenai penetapan istilah darul ahdi wa syahadah, maka dapat dimaknai bahwa penggunaan istilah Darul Ahdi wa Syahadah merupakan salah satu bentuk ijtihad Muhammadiyah. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan lebih menyebutnya dengan ijtihad Indonesiawi yang memadukan corak simbiosisme dan watak tengahan dengan dasar negara, konstitusi negara, dan semboyan bangsa (*bhineka tunggal ika*) yang merefleksi prinsip jalan tengah (*wasathiyah/ the middle path*). Dari perspektif tersebut dapat ditegaskan bahwa langkah penetapan konsep negara Darul Ahdi wa Syahadah merupakan bagian fiqih siyasah baru produk Muhammadiyah tentang negara Pancasila itu menegaskan kembali posisi dan pandangan Muhammadiyah yang menganut paham reformisme dan modernisme Islam tentang negara atau politik. Inilah fikih syiyasah baru dari Muhammadiyah untuk menyebarluaskan misi rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk melihat rasionalitas konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah dengan pemikiran politik Muhammadiyah sebelumnya, tentu dapat ditelusuri berdasarkan runutan pemikiran-pemikiran Muhammadiyah sebelumnya mengenai negara, baik yang langsung diproduksi oleh persyarikatan maupun para tokohnya. Jika melihat dari konteks lahirnya pemikiran-pemikiran Muhammadiyah mengenai negara, tampak adanya perbedaan pemikiran mengenai negara Indonesia pada setiap periode sejarah. Hal ini membuktikan bahwa Muhammadiyah tanggap terhadap kondisi yang terjadi saat itu. Ini juga memperlihatkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan membuktikan eksistensinya bahwa Muhammadiyah tidak fakum dari sejarah. Perbedaan pemikiran yang ada bukan merupakan kontradiktif antara satu era

dengan era lain, tetapi reinterpretasi agar Muhammadiyah tetap eksis dengan tantangan-tantangan yang ada.

3. Salah satu tahapan penting dalam proses pembudayaan gagasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah adalah diperlukannya pendekatan sosialisasi dan diseminasi. Upaya ini dimaksudkan agar gagasan tersebut menjadi dikenal, difahami, dan dihayati oleh masyarakat luas terutama oleh warga Muhammadiyah. Proses ini harus dilaksanakan secara lebih kreatif dan holistik meliputi dimensi kognitif, afektif dan konatif yang dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan nilai-nilai di dalamnya. Langkah-langkah ini sebetulnya sudah dilakukan dengan baik oleh Muhammadiyah walaupun memang belum maksimal. Langkah aktualisasi darul ahdi wa syahadah yang paling penting dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai darul ahdi wa syahadah melalui lembaga pendidikan di Muhammadiyah maupun kepada kader Muhammadiyah termasuk warga Muhammadiyah secara umum. Untuk dapat mengintegrasikan nilai-nilai Darul Ahdi wa Syahadah ke dalam PKn di Persekolahan dan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah maupun di masyarakat, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menggali pikiran-pikiran pokok yang terdapat dalam gagasan tersebut untuk seterusnya dapat mengintegrasikan nilai tersebut dalam PKn.

5.2 Implikasi

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah disusun, terdapat sejumlah implikasi penelitian sebagai berikut.

1. Hasil kajian ini mengisyaratkan bahwa kajian-kajian pemikiran politik Muhammadiyah mengenai Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah berimplikasi pada munculnya konsep-konsep atau teori-teori baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan sehingga dapat memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan terutama di Muhammadiyah. Temuan-temuan ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti

berikutnya untuk mengkaji secara lebih mendalam pemikiran politik lainnya dari sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Secara praktis penelitian ini berimplikasi pada tuntutan adanya penguatan kurikulum pendidikan Kewarganegaraan khususnya di Persekolahan maupun di Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berbasis pada nilai-nilai Darul Ahdi wa Syahadah. Implikasi serupa juga akan lahir pedoman berperilaku bagi warga Muhammadiyah dimasyarakat yang berbasis pada nilai-nilai Darul Ahdi wa Syahadah.

5.3 Rekomendasi

1. Pemikiran Politik Muhammadiyah telah banyak diteliti, namun belum banyak yang meneliti dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini telah berusaha menggali nilai-nilai yang terkandung dalam konsep negara darul ahdi wa syahadah. Namun belum mengkaji secara mendalam bagaimana pengintegrasian ke dalam kurikulum persekolahan maupun di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Oleh karenanya mendorong kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan yang secara spesifik mengembangkan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan berbasis darul ahdi wa syahadah.
2. Penelitian ini melihat bahwa kegiatan sosialisasi mengenai konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga diperlukan pengenalan konsep ini sampai ke akar rumput oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah terutama melalui lembaga pendidikan dibawah Muhammadiyah.
3. Mendorong Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melakukan penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan berbasis pemikiran politik tokoh maupun organisasi Muhammadiyah khususnya konsepsi Darul Ahdi wa Syahadah untuk menjadi referensi bagi pengajar maupun peserta didik baik di Perguruan Tinggi maupun sekolah-sekolah Muhammadiyah.
4. Hingga kini belum ada tafsir negara Pancasila sebagai Darul ahdi wa Syahadah sebagai wujud aktualisasi dalam aktivitas bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara sehingga mendorong Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar dapat menafsirkan konsep tersebut agar dapat dijadikan rujukan maupun pedoman berperilaku warga Muhammadiyah.

5. Mengkaji dari sudut pandang historis mengenai relasi Islam dan Negara, dirasa kurang tepat jika selalu memperhadapkan antara Islam dan Pancasila maupun antara Islam dan nasionalis karena selama ini tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Dalam arti bahwa Islam dan Pancasila selalu berjalan beriringan, bahkan dapat dikatakan bahwa Islam dan Pancasila merupakan saudara kandung. Pada konteks penghadapan antara Islam dan Nasionalis pada dasarnya golongan Islam dalam perjuangannya selama ini selalu menempatkan diri pada posisi memperjuangkan kepentingan bangsa dan Negara Indonesia. Sehingga kepada berbagai pihak terutama Pemerintah agar dapat menghindari penggunaan istilah yang mengkonfrontasi antara Islam dan Pancasila maupun antara Golongan Islam dan Golongan Nasionalis.